

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. *Agency Theory*

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Dalam hubungan ini, pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan operasional sehari-hari. Pendelegasian wewenang tersebut bertujuan agar perusahaan dapat dikelola secara lebih efektif oleh pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menjalankan bisnis. Namun, hubungan antara *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan selaras. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak. Pemegang saham umumnya menginginkan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan manajer cenderung memiliki kepentingan pribadi, seperti memperoleh bonus, insentif, atau mempertahankan posisinya. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) yang berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dalam perusahaan (Puspita *et al.*, 2025).

Pemilik menginginkan kinerja perusahaan yang optimal, sedangkan manajemen sering memiliki tujuan pribadi seperti memperoleh bonus atau mempertahankan jabatan. Perbedaan kepentingan ini mendorong manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Selain itu,

adanya asimetri informasi membuat manajemen memiliki peluang lebih besar untuk mengatur angka akuntansi tanpa diketahui pemilik. Tekanan untuk memenuhi target kinerja juga memperkuat kecenderungan tersebut. Dalam teori keagenan, kondisi ini muncul karena pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, konflik kepentingan, ketimpangan informasi, dan tekanan kinerja menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya manajemen laba (Kurnia & Mulyati, 2023). Dalam konteks pelaporan keuangan, tingkat *cash holding* juga memiliki kaitan dengan praktik manajemen laba. Ketika perusahaan memiliki tingkat kas yang rendah, kondisi tersebut dapat memicu kekhawatiran investor dan kreditur terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Situasi ini mendorong manajemen untuk menampilkan kinerja keuangan yang terlihat lebih baik, salah satunya melalui praktik manajemen laba. Dengan kata lain, rendahnya kas yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan insentif bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan guna menjaga kepercayaan pihak eksternal. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat *cash holding* yang tinggi cenderung memiliki tekanan yang lebih rendah untuk melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena kondisi kas yang kuat mencerminkan stabilitas keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun kewajiban finansialnya. Dengan demikian, manajemen tidak terlalu terdorong untuk melakukan intervensi terhadap laporan laba, karena posisi keuangan perusahaan sudah dianggap cukup aman di mata investor (Rindani & Zulfikar, 2025).

Kondisi kesulitan keuangan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Dalam situasi tersebut, manajer sebagai agen berpotensi mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan pribadi, seperti melakukan manajemen laba untuk menjaga persepsi kinerja perusahaan. Ketika perusahaan berada dalam tekanan finansial, pemegang saham cenderung memandang hal tersebut sebagai kegagalan manajer dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, manajer terdorong untuk menampilkan laporan keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya guna mempertahankan kepercayaan investor. Oleh karena itu, *financial distress* dapat memengaruhi praktik manajemen laba, di mana peningkatan tingkat kesulitan keuangan akan memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi laba oleh manajemen (Uloomudin *et al.*, 2025). Apabila strategi pengelolaan keuangan diterapkan dengan baik, perusahaan memiliki peluang untuk mengatasi kondisi *financial distress* dan menghindari risiko kebangkrutan. Namun demikian, permasalahan muncul akibat adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal.

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan adanya hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan tersebut sering muncul perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Pemilik perusahaan umumnya menginginkan peningkatan nilai perusahaan serta penyajian laporan keuangan yang transparan, sedangkan manajemen

cenderung memiliki kepentingan pribadi, seperti memperoleh bonus, mempertahankan jabatan, atau menunjukkan kinerja yang baik (Tanjung *et al.*, 2025). Dalam kondisi *financial distress*, konflik antara manajemen dan pemegang saham cenderung meningkat karena perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan kreditor. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen melakukan manajemen laba untuk menjaga citra dan kinerja perusahaan agar tetap terlihat baik. Teori agensi digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara *financial distress*, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan manajemen laba. *Financial distress* dapat mendorong tindakan oportunistik manajemen, sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi praktik manajemen laba akibat adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Agen umumnya memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan prinsipal, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi. Di sisi lain, agen juga memiliki kepentingan pribadi, seperti meningkatkan kompensasi atau mempertahankan kekuasaan, yang tidak selalu sejalan dengan tujuan utama perusahaan dalam memaksimalkan nilai. Kondisi ini mendorong agen untuk memanfaatkan keunggulan informasi yang dimilikinya guna mencapai tujuan pribadi, salah satunya melalui praktik manajemen laba (Manik *et al.*, 2026).

2. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mempengaruhi jumlah laba yang dilaporkan, baik dengan menaikkan maupun menurunkannya sesuai dengan kepentingan tertentu. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran dalam standar akuntansi, sehingga laba yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam pemilihan metode dan kebijakan akuntansi yang diperbolehkan, sehingga laba yang dihasilkan dapat mencerminkan tujuan pribadi manajer atau kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen laba juga dipahami sebagai bentuk campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal, yang dilakukan secara sengaja untuk mengubah informasi laba agar terlihat sesuai dengan target yang diinginkan. Lebih lanjut, manajemen laba dapat diartikan sebagai serangkaian langkah terencana yang masih berada dalam batas prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan untuk mencapai tingkat pendapatan tertentu. Dilihat dari pengaruhnya, manajemen laba memiliki dua sisi. Di satu sisi, praktik ini dapat memberikan manfaat bagi manajemen, seperti menjaga stabilitas laba, meningkatkan kepercayaan investor, serta memenuhi target kinerja atau kontrak tertentu. Namun di sisi lain, manajemen laba dapat menurunkan kualitas laporan keuangan karena informasi yang disajikan menjadi bias dan kurang transparan. Hal ini berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan

keputusan, serta meningkatkan risiko konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan demikian, meskipun tidak selalu melanggar aturan, praktik manajemen laba berpotensi menurunkan kualitas dan keandalan informasi laporan keuangan karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya (Ningrum *et al.*, 2024). Pendekatan yang digunakan untuk mengukur praktik ini adalah metode *discretionary accruals modified jones*, merupakan komponen akrual hasil pengelolaan yang dilakukan oleh manajer dengan pemanfaatan kebebasan dan keleluasaan membuat perkiraan dan pemakaian standar akuntansi. Komponen ini memungkinkan manajemen membuat perkiraan atau penilaian tertentu yang dapat mempengaruhi jumlah laba akan dilaporkan pada periode akuntansi tertentu (Khotimah, 2025).

Berdasarkan jenisnya, manajemen laba dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, *income increasing earnings management*, yaitu tindakan untuk menaikkan laba yang dilaporkan dengan tujuan tertentu, seperti menarik minat investor atau memperoleh bonus. Kedua, *income decreasing earnings management*, yakni upaya menurunkan laba, misalnya untuk mengurangi beban pajak atau menghindari tekanan dari pihak eksternal. Ketiga, *income smoothing*, yaitu praktik meratakan laba agar tampak lebih stabil dari periode ke periode. Keempat, *taking a bath (big bath)*, yaitu pengakuan kerugian dalam jumlah besar pada satu periode agar kinerja pada periode berikutnya terlihat lebih baik. Selain itu, jika dilihat dari pendekatannya, manajemen laba juga dapat dibagi menjadi *accrual earnings*

management, yang dilakukan melalui pemilihan kebijakan akuntansi, serta *real earnings management*, yang dilakukan melalui manipulasi aktivitas operasional perusahaan.

Manipulasi informasi yang digunakan pihak lain untuk menilai kinerja dan kesehatan perusahaan manajemen laba dapat dianggap sebagai bentuk penipuan yang dilakukan oleh manajer. Bagaimanapun, manajemen laba bukanlah suatu penipuan jika dilakukan dengan benar sesuai aturan akuntansi. Ada sejumlah pendekatan dan proses yang diuraikan dalam prinsip akuntansi umum manajer bebas memilih mana yang paling sesuai untuk bisnis mereka. Dengan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku, manajemen laba tidak dianggap sebagai bentuk kecurangan. Dengan demikian, manajemen laba dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan manajemen serta kondisi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan seperti *Good Corporate Governance* untuk menekan dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya (Gunawan & Herman, 2025).

3. *Financial Distress*

Financial distress adalah kondisi yang mencerminkan menurunnya kinerja keuangan perusahaan dan kerap dipandang sebagai indikasi awal terjadinya kebangkrutan. Situasi ini terjadi ketika aktivitas operasional tidak berjalan secara efektif, sehingga arus kas serta pendapatan yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Dengan

demikian, perusahaan menghadapi kesulitan keuangan karena jumlah aset yang dimiliki tidak memadai untuk menutupi seluruh kewajibannya bisa dikatakan sebagai tanda-tanda awal dari kebangkrutan perusahaan, karena dimana menurunnya kondisi keuangan perusahaan dari kegiatan operasional perusahaan yang kurang baik, yang sehingga mengakibatkan perusahaan berada dalam kesulitan keuangan saat memenuhi kewajiban yang harus dibayarnya karena total aset yang dimiliki tidak mampu menutup seluruh kewajiban (Kurnia & Mulyati, 2023). Ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan daya saing terhadap kompetitor dapat berdampak pada penurunan kinerja keuangan dan meningkatkan risiko terjadinya *financial distress*. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik oleh manajemen, maka perusahaan biasanya mengambil langkah seperti melakukan perubahan dalam struktur manajerial. Selain itu, tekanan tersebut juga mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba sebagai upaya memperbaiki citra kinerja keuangan. Praktik ini dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan atau meminimalkan kerugian melalui pemanfaatan kebijakan dan teknik akuntansi tertentu (Manik *et al.*, 2026).

Kondisi *financial distress* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Faktor internal mencakup kelemahan dalam pengelolaan manajemen, ketidakefisienan operasional, tingginya tingkat utang, serta menurunnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan kondisi perekonomian, dinamika pasar, tingkat persaingan industri, hingga

kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Perpaduan dari faktor-faktor tersebut dapat mempercepat memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, perusahaan berpotensi mengalami kepailitan. Banyak perusahaan di Indonesia menghadapi kesulitan keuangan akibat pendapatan yang tidak mencukupi untuk mendukung operasional, sehingga berujung pada kelalaian atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan (Tsaqif & Agustiningsih, 2021). Situasi ini umumnya ditandai dengan potensi defisit serta ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo. Secara analitis, kondisi *financial distress* menjadi sinyal awal menurunnya kesehatan keuangan perusahaan yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Jika tidak segera diatasi melalui strategi yang tepat, seperti perbaikan kinerja operasional atau restrukturisasi keuangan, maka perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. *Financial distress* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu *economic failure*, kondisi ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja ekonomi sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mampu memberikan tingkat keuntungan yang memadai. Pada tahap ini perusahaan belum tentu mengalami kebangkrutan atau tidak mampu membayar utang, tetapi perusahaan sudah tidak mampu menghasilkan laba sesuai dengan harapan investor atau biaya modal yang dikeluarkan. Dalam konteks *financial distress*, *economic failure* merupakan tahap awal sebelum terjadinya kesulitan keuangan yang lebih serius. Perusahaan masih dapat beroperasi, namun efisiensi dan

profitabilitasnya terus menurun.; *business failure*, yaitu kondisi ketika suatu perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan usahanya secara efektif sehingga mengalami penurunan kinerja, kesulitan keuangan, dan pada akhirnya tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. *Business failure* tidak selalu berarti perusahaan langsung bangkrut, tetapi merupakan proses yang menunjukkan kegagalan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau memenuhi kewajiban operasionalnya.; *technical insolvency*, yaitu merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang telah jatuh tempo akibat keterbatasan kas atau aset lancar yang dapat segera dicairkan. Pada kondisi ini, perusahaan belum tentu mengalami kebangkrutan karena nilai total aset yang dimiliki masih dapat melebihi total liabilitasnya. Dengan kata lain, *technical insolvency* lebih mencerminkan masalah likuiditas daripada masalah solvabilitas.

Technical insolvency sering dianggap sebagai tahap awal dari *financial distress*. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi melalui pengelolaan arus kas, peningkatan likuiditas, atau restrukturisasi kewajiban, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan yang lebih serius hingga mengarah pada kebangkrutan. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya *technical insolvency*. *Legal bankruptcy*, merupakan bentuk kebangkrutan yang bersifat formal dan memiliki konsekuensi hukum, seperti penyitaan dan pemberesan aset perusahaan untuk

membayar kewajiban kepada kreditur. Oleh karena itu, *legal bankruptcy* berbeda dengan *financial distress*, karena tidak semua perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan berakhir pada kondisi pailit secara hukum. Dengan demikian *financial distress* merupakan kondisi yang terjadi secara bertahap, dimulai dari penurunan kinerja keuangan perusahaan, seperti menurunnya laba, terganggunya arus kas, atau meningkatnya beban utang. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi melalui langkah-langkah perbaikan, kesulitan keuangan dapat semakin memburuk hingga perusahaan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mengarah pada kebangkrutan atau kepailitan. Dalam penelitian ini, *financial distress* diukur menggunakan model Altman Z-Score yang dikembangkan oleh Edward I. Altman (1968). Model ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk memprediksi potensi kesulitan keuangan (*financial distress*) atau kebangkrutan perusahaan melalui analisis rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai Z-Score, semakin baik kondisi keuangan perusahaan dan semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Sebaliknya, semakin rendah nilai Z-Score, semakin besar risiko perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, *financial distress* sering dipandang sebagai tahap awal yang menjadi peringatan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan secara menyeluruh (Putri *et al.*, 2025).

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah komponen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang mencerminkan besarnya persentase saham yang dikuasai oleh lembaga atau institusi, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perbankan, maupun entitas investasi lainnya. Besaran ini biasanya diukur dari perbandingan jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap total saham beredar pada akhir periode tertentu. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat pula fungsi pengawasan terhadap manajemen, karena institusi umumnya memiliki sumber daya dan kepentingan yang lebih besar dalam menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan. Investor institusional umumnya memiliki kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang lebih baik dibandingkan investor individu, sehingga mampu melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen. Tingginya kepemilikan institusional akan meningkatkan intensitas monitoring, yang pada akhirnya dapat membatasi perilaku oportunistik manajer. Efektivitas pengawasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain besarnya proporsi saham yang dimiliki institusi, kemampuan dan pengalaman institusi dalam melakukan monitoring, serta tingkat independensi institusi terhadap manajemen perusahaan. Selain itu, transparansi informasi dan kualitas tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) juga berperan penting dalam memperkuat fungsi pengawasan. Dengan demikian, semakin besar dan efektif peran kepemilikan institusional, maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan tindakan

yang merugikan pemegang saham. Dengan adanya pengawasan tersebut, manajemen cenderung lebih fokus pada peningkatan kinerja perusahaan dan mengurangi tindakan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi. Peran kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengendalian semakin kuat karena besarnya investasi yang mereka tanamkan di pasar modal (Sarina *et al.*, 2022). Yaitu pihak yang memiliki kepemilikan saham lebih dari 5% namun tidak termasuk dalam kategori insider. Keberadaan pemegang saham institusional dengan porsi yang signifikan memungkinkan terciptanya pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja manajemen. Secara analitis, semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin kuat pula fungsi monitoring yang dapat menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk pemborosan dan pengambilan keputusan yang tidak efisien (Himawan & Maharani, 2023).

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh pihak ketiga berupa lembaga atau institusi yang menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang dianggap mampu mengelola investasi tersebut secara profesional. Institusi tersebut dapat berupa bank, perusahaan keuangan, maupun lembaga non-keuangan lainnya. Secara umum, kepemilikan ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor institusional terhadap kinerja dan prospek perusahaan, sekaligus berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas manajemen (William & Widjaja, 2024).

Kehadiran investor institusional ini dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen. Secara analitis, keterlibatan institusi dalam proses pengambilan keputusan strategis membuat pengawasan menjadi lebih ketat, sehingga manajemen tidak leluasa melakukan tindakan oportunistik seperti manipulasi laba. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi pula tingkat kontrol terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan (Hidayat *et al.*, 2025).

5. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan afiliasi lainnya dengan manajemen atau pemegang saham pengendali, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan independen. Keberadaan komisaris independen menjadi salah satu elemen penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), karena berperan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari potensi tindakan oportunistik manajemen. Keberadaan komisaris independen diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen dari pihak eksternal dengan jumlah sekurang-kurangnya 30% dari total anggota dewan, yang dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara analitis, peran komisaris independen sangat penting dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen,

memastikan transparansi, serta menjaga akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan independensinya, komisaris diharapkan mampu meminimalkan konflik kepentingan dan menekan praktik oportunistik seperti manajemen laba, sehingga kualitas tata kelola perusahaan menjadi lebih baik (Sholihah & Rosdiana, 2022).

Peran yang sangat penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Komisaris independen dituntut untuk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan komisaris lain, direksi, maupun pemegang saham pengendali, serta bebas dari kepentingan bisnis tertentu, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional. Secara analitis, independensi tersebut memungkinkan komisaris independen bertindak secara netral dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk dalam memastikan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Efektivitas kinerja komisaris independen dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya proporsi jumlah komisaris independen dalam struktur dewan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki, dan tingkat independensi yang nyata, bukan sekadar formalitas. Selain itu, frekuensi rapat serta keaktifan dalam proses pengambilan keputusan juga turut menentukan peran pengawasan yang dijalankan. Di samping itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta keterbukaan informasi menjadi faktor pendukung yang memengaruhi optimal tidaknya fungsi pengawasan komisaris independen. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen tidak hanya memperkuat mekanisme pengendalian internal, tetapi juga berperan dalam

meminimalkan praktik oportunistik seperti manajemen laba serta menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan (Khotimah, 2025).

Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen, termasuk dalam memastikan keandalan laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali memungkinkan pengawasan dilakukan secara objektif dan profesional. Berdasarkan karakteristiknya, komisaris independen dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti yang memiliki latar belakang profesional, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun ahli di bidang tertentu, serta komisaris independen yang berasal dari pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan bisnis sebelumnya dengan perusahaan. Selain itu, jika dilihat dari perannya, komisaris independen dapat bersifat aktif, yaitu terlibat secara intens dalam fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, maupun pasif, yang hanya menjalankan peran secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan jenis dan kualitas komisaris independen akan memengaruhi tingkat efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan secara analitis, fungsi monitoring ini mampu meminimalkan praktik penyimpangan, termasuk manajemen laba, karena setiap kebijakan keuangan akan ditelaah secara lebih ketat. Dengan demikian, dewan komisaris independen berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga potensi manipulasi laba oleh manajemen dapat ditekan (Khafidaturofi'ah & Setiyono, 2026).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Puspita <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023	X1: <i>Financial Distress</i> X2: Ukuran Perusahaan X3: <i>Leverage</i> Y: Manajemen Laba Z: Kepemilikan Manajerial	<i>Financial distress</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan. Selain itu, kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan manajemen laba.
2	Uluummudin <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Tax Planning</i> , dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> Periode 2019-2023 dengan Kepemilikan Institusional sebagai Faktor Moderasi	X1: <i>Financial Distress</i> X2: <i>Tax Planning</i> X3: <i>Leverage</i> Y: Manajemen Laba Z: Kepemilikan Institusional	Variabel independen yang terdiri dari <i>financial distress</i> , <i>tax planning</i> , dan <i>leverage</i> terbukti mempengaruhi manajemen laba. Namun, kepemilikan institusional hanya berfungsi sebagai variabel moderasi pada hubungan <i>tax planning</i> dan <i>leverage</i> terhadap manajemen laba, serta tidak memoderasi pengaruh <i>financial distress</i> terhadap manajemen laba.
3	Dhaneswara & Rahayuningsih,	Pengaruh <i>Financial</i>	X1: <i>Financial</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif dan

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
	(2025)	<i>Distress, Karakteristik Perusahaan, Dan Opportunistic Behavior Terhadap Manajemen Laba Dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</i>	<i>Distress</i> X2: Karakteristik Perusahaan X3: <i>Opportunistic Behavior</i> Y: Manajemen Laba Z: Struktur Kepemilikan	signifikan terhadap manajemen laba, yang berarti semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan, kecenderungan manajemen laba justru menurun. Sementara itu, karakteristik perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga tidak memberikan dampak yang berarti. Di sisi lain, opportunistic behavior berpengaruh positif dan signifikan, menandakan bahwa perilaku oportunistik mendorong peningkatan praktik manajemen laba. Adapun struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan dan juga tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan manajemen laba.
4	Shofiyah <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi pada Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di	X1: <i>Financial Distress</i> X2: Ukuran Perusahaan Y: Manajemen Laba Z: Kepemilikan Manajerial	<i>Financial distress</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sehingga kondisi kesulitan keuangan tidak selalu mendorong manajemen melakukan manipulasi laba. Sebaliknya, ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti semakin besar perusahaan maka

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		BEI Periode 2020-2023		semakin tinggi kecenderungan praktik manajemen laba. Sementara itu, kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara <i>financial distress</i> dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, sehingga perannya dinilai tidak signifikan.
5	Wahyu <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba: Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 30 Periode 2020-2022	X1: <i>Financial Distress</i> X2: Ukuran Perusahaan Y: Manajemen Laba	<i>Financial distress</i> cenderung berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan, semakin besar dorongan manajemen untuk memanipulasi laba guna menjaga citra perusahaan. Ukuran perusahaan juga umumnya berpengaruh positif signifikan, karena perusahaan besar menghadapi tekanan lebih besar dari investor dan publik. Namun, keberadaan variabel moderasi seperti <i>corporate governance</i> dapat memperlemah hubungan tersebut, sehingga praktik manajemen laba dapat diminimalkan.
6	Manik <i>et al.</i> ,	Efektivitas Dewan	X1: <i>Financial</i>	<i>Financial distress</i> mendorong perusahaan

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
	(2026)	Komisaris dalam Memoderasi Hubungan <i>Financial Distress</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	<i>Distress</i> X2: Ukuran Perusahaan Y: Manajemen Laba Z: Dewan Komisaris	melakukan manajemen laba karena adanya tekanan keuangan, sementara ukuran perusahaan yang lebih besar juga cenderung meningkatkan praktik tersebut. Namun, keberadaan dewan komisaris sebagai variabel moderasi mampu memperlemah pengaruh keduanya dengan memperkuat fungsi pengawasan, sehingga praktik manajemen laba dapat ditekan.
7	Febrianthi & Prihantari, (2025)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Manajemen Laba	X1: Kepemilikan Manajerial X2: Kebijakan Hutang X3: <i>Financial Distress</i> Y: Manajemen Laba	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa semakin besar porsi saham yang dimiliki manajer, semakin kecil kecenderungan melakukan manipulasi laba karena adanya keselarasan kepentingan dengan pemegang saham. Sebaliknya, kebijakan hutang dan <i>financial distress</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Tingginya tingkat hutang mendorong manajemen melakukan penyesuaian laba untuk memenuhi kewajiban kontraktual, sementara kondisi kesulitan keuangan membuat

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
				perusahaan cenderung memanipulasi laba guna menjaga citra kinerja di mata investor dan kreditur.
8	Tsaqif & Agustiningsih, (2021)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi	X1: <i>Financial Distress</i> X2: Ukuran Perusahaan Y: Manajemen Laba Z: Kepemilikan Manajerial	<i>Financial distress</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sehingga kondisi kesulitan keuangan tidak selalu mendorong Perusahaan melakukan manipulasi laba. Sebaliknya, ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih tinggi. Selain itu, kepemilikan manajerial tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara <i>financial distress</i> maupun ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
9	Putri <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> , <i>Financial Distress</i> , dan Investment Opportunity Set terhadap Manajemen Laba: Studi Pada Perusahaan	X1: <i>Free Cash Flow</i> X2: <i>Financial Distress</i> X3: Investment Opportunity Set Y:	<i>Free cash flow</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa semakin besar arus kas bebas, semakin tinggi kecenderungan praktik manipulasi laba. <i>Financial distress</i> juga

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Infrastruktur, Transportasi, dan Logistik	Manajemen Laba	berpengaruh signifikan karena tekanan keuangan mendorong manajemen memperbaiki tampilan kinerja melalui manajemen laba. Selain itu, investment opportunity set turut memengaruhi manajemen laba, di mana perusahaan dengan peluang investasi tinggi cenderung melakukan manipulasi laba untuk menarik investor dan menjaga citra kinerja.
10	Kurnia & Mulyati, (2023)	Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	X1: <i>Free Cash Flow</i> X2: <i>Financial Distress</i> Y: Manajemen Laba	<i>Free cash flow</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa semakin besar arus kas bebas, semakin tinggi peluang manajemen melakukan manipulasi laba karena fleksibilitas penggunaan dana. <i>Financial distress</i> juga berpengaruh, di mana tekanan keuangan mendorong perusahaan memperbaiki citra kinerja melalui manajemen laba. Secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
11	Rindani & Zulfikar, (2025)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Cash Holdings</i> , dan Profitabilitas	X1: <i>Financial Distress</i> X2: <i>Cash Holdings</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sementara cash holdings dan

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Terhadap Manajemen Laba Dengan Syaria <i>Supervisory Board</i> Sebagai Variabel Moderasi	X3: Profitabilitas Y: Manajemen Laba Z: Syaria <i>Supervisory Board</i>	profitabilitas berpengaruh negatif. Selain itu, keberadaan <i>Sharia Supervisory Board</i> mampu memoderasi hubungan tersebut dengan mengurangi praktik manajemen laba melalui peningkatan fungsi pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
12	Gunawan & Herman, (2025)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Dengan Kualitas Audit	X1: Kepemilikan Institusional X2: <i>Leverage</i> X3: Profitabilitas Y: Manajemen Laba Z: Kualitas Audit	Kepemilikan institusional, <i>leverage</i> , dan profitabilitas memengaruhi manajemen laba. Kepemilikan institusional cenderung menekan praktik tersebut melalui fungsi pengawasan, sementara <i>leverage</i> dan profitabilitas justru mendorongnya akibat tekanan kontraktual dan target kinerja. Di sisi lain, kualitas audit berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah pengaruh ketiga variabel tersebut, sehingga keberadaan auditor yang berkualitas mampu meningkatkan transparansi dan meminimalkan manipulasi laporan keuangan.
13	Himawan & Maharani,	Analisis Kepemilikan	X1: Kepemilikan	Kelima variabel independen berpengaruh

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
	(2023)	Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba	Manajerial X2: Kepemilikan Institusional X3: Komite Audit X4: <i>Leverage</i> X5: Profitabilitas Y: Manajemen Laba	terhadap manajemen laba. Mekanisme <i>good corporate governance</i> , seperti kepemilikan dan komite audit, cenderung membatasi praktik tersebut, sementara <i>leverage</i> dan profitabilitas justru dapat mendorong terjadinya manajemen laba.
14	Sarina <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing Dan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba Informatif (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020)	X1: Kepemilikan Manajerial X2: Kepemilikan Institusional X3: Kepemilikan Asing X4: Asimetri Informasi Y: Manajemen Laba Informatif	Kepemilikan saham baik manajerial, institusional, maupun asing cenderung mengurangi praktik manajemen laba karena berfungsi sebagai alat pengawasan. Sebaliknya, asimetri informasi meningkatkan kemungkinan terjadinya manajemen laba informatif.
15	Luthfi, (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Arus Kas Bebas, Kepemilikan Institusional, Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	X1: Dewan Komisaris Independen X2: Arus Kas Bebas X3: Kepemilikan Institusional X4: Komite Audit Y:	Mekanisme tata kelola perusahaan seperti dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit umumnya menekan manajemen laba, sehingga semakin efektif pengawasan, semakin rendah praktik tersebut. Sebaliknya, arus kas

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
			Manajemen Laba	bebas cenderung meningkatkan manajemen laba karena ketersediaan dana yang besar memberi peluang bagi manajer untuk melakukan manipulasi demi kepentingan tertentu.
16	Malajai & Yoosita, (2024)	Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Praktik Manajemen Laba Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi	X1: Kepemilikan Institusional X2: Kepemilikan Manajerial Y: Manajemen Laba Z: <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Kepemilikan institusional dan manajerial dapat menekan manajemen laba, dan pengaruhnya semakin kuat apabila perusahaan menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> secara efektif.
17	Rakasiwi & Pujiati, (2024)	Pengaruh kepemilikan institusional, kinerja keuangan, <i>financial distress</i> terhadap manajemen laba	X1: Kepemilikan Institusional X2: Kinerja Keuangan X3: <i>Financial Distress</i> Y: Manajemen Laba	Kepemilikan institusional dan manajerial cenderung mengurangi praktik manajemen laba, dan efek tersebut semakin kuat dengan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang baik.
18	Ramadhanty & Aprilia, (2025)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Pinjaman Dana dan Latar Belakang	X1: Ukuran Perusahaan X2: Kepemilikan Institusional X3: Pinjaman Dana <i>Leverage</i>	Ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional cenderung mengurangi praktik manajemen laba, sementara pinjaman dana justru mendorong peningkatannya. Selain itu, latar belakang

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Pendidikan Direktur Utama terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020	X4: Latar Belakang Pendidikan Direktur Utama Y: Manajemen Laba	pendidikan direktur utama turut memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan manajemen laba.
19	William & Widjaja, (2024)	Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Kepemilikan Institusional, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi Periode 2019-2022	X1: <i>Tax Planning</i> X2: Kepemilikan Institusional X3: <i>Leverage</i> Y: Manajemen Laba	Tax planning dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sementara kepemilikan institusional berpengaruh negatif. Profitabilitas tidak hanya berpengaruh langsung, tetapi juga berperan sebagai variabel mediasi yang memengaruhi hubungan antara <i>tax planning</i> , kepemilikan institusional, dan <i>leverage</i> terhadap manajemen laba, sehingga dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh tersebut.
20	Hidayat <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap	X1: Kepemilikan Institusional X2: Komite Audit X3: Solvabilitas X4: Ukuran Perusahaan	Penelitian ini menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hasilnya menunjukkan bahwa

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Manajemen Laba	Y: Manajemen Laba	kepemilikan institusional dan komite audit menekan manajemen laba melalui peningkatan pengawasan. Sebaliknya, solvabilitas mendorong manajemen laba akibat tekanan utang yang tinggi. Sementara itu, ukuran perusahaan cenderung menurunkan praktik tersebut karena perusahaan besar lebih transparan dan mendapat pengawasan lebih ketat.
21	Ningrum <i>et al.</i> , (2024)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia	X1: Komite Audit X2: Kepemilikan Institusional X3: Komisaris Independen X4: <i>Leverage</i> Y: Manajemen Laba	Komite audit, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan <i>leverage</i> terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Mekanisme <i>corporate governance</i> cenderung mengurangi praktik manajemen laba, sementara <i>leverage</i> justru mendorong peningkatannya akibat tekanan Keuangan.
22	Khotimah, (2025)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Sub Sektor Farmasi Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-	X1: Dewan Komisaris Independen X2: Kepemilikan Institusional Y: Manajemen Laba	Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> yang dapat mengurangi praktik manajemen laba, namun tingkat efektivitasnya bergantung pada kondisi perusahaan serta kualitas

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		2023)		penerapannya.
23	Tsaqif & Agustiniingsih, (2021)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)	X1: Struktur Kepemilikan X2: Ukuran Perusahaan X3: Komisaris Independen X4: Kompensasi Bonus	Secara bersama-sama, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kompensasi bonus mempengaruhi manajemen laba. Secara individu, keberadaan komisaris independen mampu mengurangi praktik manajemen laba, sementara kompensasi bonus justru meningkatkan kecenderungan manajemen laba.
24	Das <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik di BEI Tahun 2020-2024	X1: Dewan Komisaris X2: Dewan Direksi X3: Ukuran Perusahaan Y: Manajemen Laba	Secara bersama-sama, dewan komisaris, dewan direksi, dan ukuran perusahaan memengaruhi manajemen laba. Tata kelola perusahaan yang efektif mampu mengurangi praktik tersebut, namun tekanan operasional dan kepentingan manajemen dapat meningkatkan kecenderungan manajemen laba.
25	Yayan & Dian, (2025)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , Arus Kas Bebas,	X1: Kepemilikan Manajerial X2: Kepemilikan Institusional X3: <i>Leverage</i>	Secara simultan, dewan komisaris, dewan direksi, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Penerapan <i>corporate governance</i>

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Dewan Komisaris Independen dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2023	X4: Arus Kas Bebas X5: Dewan Komisaris Independen X6: Perencanaan Pajak Y: Manajemen Laba	yang baik mampu menekan praktik manajemen laba, sedangkan tekanan operasional dan kepentingan manajemen justru dapat mendorong terjadinya praktik tersebut.
26	Khafidaturofi'ah & Setiyono, (2026)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas Terhadap Earning <i>Management</i> Perusahaan BUMN	X1: Komite Audit X2: Kepemilikan Manajerial X3: Dewan Komisaris Independen X4: <i>Leverage</i> X5: Likuiditas Y: Manajemen Laba	Penelitian ini menggunakan komite audit, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, <i>leverage</i> , dan likuiditas sebagai variabel independen, serta manajemen laba sebagai variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme <i>corporate governance</i> mampu menekan praktik manajemen laba. Sebaliknya, <i>leverage</i> cenderung meningkatkan manajemen laba akibat tekanan kreditur, sementara likuiditas memberikan hasil yang tidak konsisten, baik berpengaruh negatif maupun tidak signifikan.
27	Sholihah & Rosdiana, (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan	X1: Dewan Komisaris Independen X2: Komite Audit	Secara simultan, dewan komisaris independen dan komite audit sebagai bagian dari mekanisme <i>Good Corporate</i>

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba	X3: Profitabilitas Y: Manajemen Laba	<i>Governance</i> mampu mengurangi praktik manajemen laba. Sebaliknya, profitabilitas dapat mendorong terjadinya manajemen laba, tergantung pada motivasi manajemen dalam menjaga kinerja perusahaan.
28	Rindiana <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	X1: Dewan Komisaris Independen X2: <i>Leverage</i> X3: Ukuran Perusahaan Y: Manajemen Laba	Dewan komisaris independen cenderung menekan manajemen laba karena memperkuat fungsi pengawasan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Sebaliknya, <i>leverage</i> berpengaruh positif karena tingginya utang mendorong manajemen melakukan manipulasi laba untuk memenuhi kewajiban. Sementara itu, ukuran perusahaan berpengaruh negatif, karena perusahaan besar berada di bawah pengawasan publik dan regulator yang lebih ketat sehingga pelaporan keuangannya lebih transparan.
29	Muhammad <i>et al.</i> , (2026)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek	X1: Dewan Komisaris Independen X2: Ukuran Dewan Komisaris X3: Dewan Direksi X4: Komite Audit	Dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terbukti menekan manajemen laba, sehingga semakin kuat fungsi pengawasan, semakin kecil peluang manipulasi laba. Kepemilikan manajerial

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Indonesia (BEI) Periode 2021-2022	X5: Kepemilikan Institusional X6: Kepemilikan Manajerial	juga cenderung berdampak negatif, namun tidak selalu signifikan. Secara umum, penerapan <i>corporate governance</i> yang efektif mampu mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan sektor energi.
30	Raras <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba	X1: Kepemilikan Manajerial X2: Dewan Komisaris Independen X3: Komite Audit Independen Y: Manajemen Laba	Kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit independen berperan dalam mengurangi praktik manajemen laba. Tingginya kepemilikan manajerial mendorong transparansi, sedangkan dewan komisaris dan komite audit independen meningkatkan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut cenderung berdampak negatif terhadap manajemen laba.
31	Aljughaiman <i>et al.</i> , (2023)	<i>The Covid-19 outbreak. corporate financial distress and earnings management</i>	X1: Covid-19 Outbreak X2: Corporate Financial Distress Y: Earnings Management	Hasil penelitian "The Covid-19 Outbreak, Corporate Financial Distress and Earnings Management" menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 meningkatkan kondisi <i>financial distress</i> perusahaan sehingga mendorong manajemen melakukan praktik

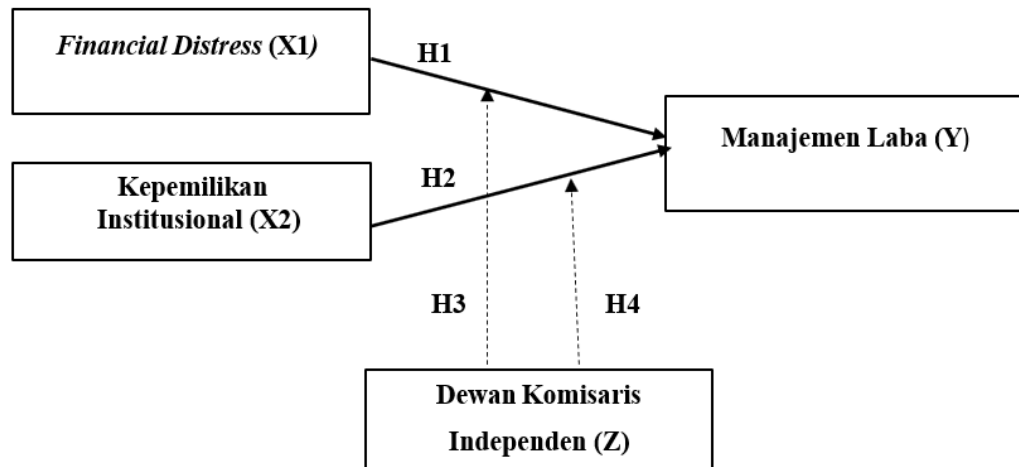
No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
				manajemen laba. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menjaga kinerja perusahaan di mata investor dan kreditor. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa tingkat manajemen laba menjadi lebih tinggi selama periode pandemi dibandingkan sebelum pandemi.
32	Ghazali <i>et al.</i> , (2021)	<i>Earnings Management: An Analysis of Opportunistic Behaviour, Monitoring Mechanism and Financial Distress</i>	X1: <i>Opportunistic Behaviour</i> X2: <i>Monitoring Mechanism</i> Y: <i>Earnings Management</i> Z: <i>Financial Distress</i>	Penelitian ini membuktikan bahwa kondisi <i>financial distress</i> meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba. Namun, keberadaan mekanisme pengawasan perusahaan yang efektif mampu mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan.
33	Cheng & Fang, (2025)	<i>Financial distress and return: A finite mixture approach</i>	X1: <i>Financial Distress</i> Y: <i>Return</i> (tingkat pengembalian saham)	Penelitian ini membuktikan bahwa <i>financial distress</i> memengaruhi return saham perusahaan. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan, maka risiko investasi juga meningkat tinggi.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berfikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dari tahapan skema sebagai berikut :



Gambar 2 1 Kerangka Berfikir

Keterangan Gambar:

- → : Menunjukkan jalur pengaruh langsung (*direct effect*) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- - - → : Menunjukkan jalur pengaruh moderasi (*moderating effect*) variabel

pemoderasi (Z) dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Gambar di atas menjelaskan alur hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Variabel *Financial Distress* (X1) dan Kepemilikan Institusional (X2) diuji pengaruh langsungnya terhadap Manajemen Laba (Y) yang ditunjukkan oleh garis lurus utuh ($\rightarrow$). Selanjutnya, Dewan Komisaris Independen (Z) berperan sebagai variabel pemoderasi yang memoderasi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, yang ditunjukkan oleh garis putus-putus ($- - \rightarrow$).

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Financial Distress terhadap Manajemen Laba

Perusahaan yang mengalami penurunan kinerja keuangan secara terus-menerus hingga mengancam kelangsungan usahanya dikategorikan dalam kondisi *financial distress*. Kondisi ini mencerminkan kesulitan keuangan serius yang berpotensi mengarah pada kebangkrutan, umumnya disebabkan oleh penurunan laba, ketidakstabilan arus kas, dan tingginya beban utang.

Dalam situasi tersebut, manajemen sering melakukan praktik manajemen laba, seperti *income smoothing*, yaitu meratakan laba agar terlihat stabil. Hal ini dilakukan untuk menarik dan mempertahankan kepercayaan investor, karena investor cenderung menyukai perusahaan dengan kinerja laba yang konsisten. Namun, tindakan ini dapat mengurangi kualitas laporan

keuangan karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Kurnia & Mulyati, 2023).

Chairunnisa *et al.*, (2021), berpendapat bahwa *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung terdorong melakukan praktik manajemen laba untuk mempertahankan citra kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajemen melakukan manipulasi laba guna menjaga kepercayaan investor dan kreditor.

Menurut Manik *et al.*, (2026), manajemen cenderung melakukan manajemen laba saat kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan, sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan investor. Tindakan ini dilakukan agar perusahaan tetap dapat memperoleh pendanaan dari pihak luar guna menunjang keberlangsungan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang semakin menurun akan mendorong peningkatan praktik manajemen laba. Upaya ini dilakukan oleh manajemen untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan perusahaan tetap memperoleh sumber pendanaan dari pihak eksternal guna mendukung aktivitas operasionalnya.

Pendasaran hipotesis ini merujuk pada Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Sinyal (*Signaling Theory*). Berdasarkan *Agency Theory*, konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) dapat mendorong manajer untuk bertindak oportunistik guna menyelamatkan

posisinya saat perusahaan berada dalam kondisi kritis. Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, manajer terdorong melakukan tindakan manajemen laba (*income smoothing* atau *income increasing*) untuk menyembunyikan kinerja keuangan yang buruk agar terhindar dari pemutusan hubungan kerja atau pelanggaran perjanjian utang (*debt covenant*). Didukung oleh *Signaling Theory*, manajer berusaha memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan masih dalam kondisi stabil meskipun sedang mengalami tekanan keuangan. Penelitian Chairunnisa *et al.*, (2021) membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap tindakan manajemen laba. Hasil penelitian yang dapat memperlihatkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap manajemen laba maka hipotesis adalah sebagai berikut :

H1 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga tertentu, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Investor institusional dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Selain itu, investor institusional juga cenderung terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap tindakan manajemen (Ramadhanty & Aprilia, 2025). Semakin besar tingkat kepemilikan institusional, maka pengawasan terhadap manajemen akan

semakin kuat sehingga peluang terjadinya praktik manajemen laba dapat diminimalkan. Investor institusional umumnya menginginkan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam melakukan manipulasi laba

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba akan semakin menurun. Hal ini karena investor institusional memiliki kemampuan pengawasan yang lebih kuat terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat membatasi tindakan oportunistik. Dengan adanya

kepemilikan institusional yang tinggi, efektivitas monitoring meningkat dan mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat (Hidayat *et al.*, 2025).

Menurut Pambudi & Rilo (2025), kepemilikan institusional berfungsi sebagai alat pengawasan yang dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Institusi yang memiliki porsi saham besar cenderung memiliki kemampuan dan dorongan untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga dapat menekan tindakan manipulasi laba. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba. Maka hipotesis adalah sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

3. Dewan Komisaris Independen berperan sebagai Variabel Moderasi antara

Financial Distress dan Manajemen Laba

Dalam teori agensi, dewan komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi tindakan oportunistik manajemen. Semakin efektif pengawasan yang dilakukan, maka hubungan antara *financial distress* dan manajemen laba akan semakin kuat terkontrol. Keberadaan dewan komisaris independen dinilai mampu memengaruhi tindakan manajemen dalam kondisi tekanan keuangan (Hasnawati, 2026).

Sholihah & Rosdiana (2022), berpendapat bahwa teori keagenan menyatakan bahwa peningkatan independensi dewan dapat dicapai dengan memperbesar proporsi anggota dari pihak eksternal. Kehadiran komisaris non-eksekutif dianggap penting untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku oportunistik manajemen. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka fungsi pengawasan akan menjadi lebih efektif dan objektif. Hal ini dapat menekan potensi kecurangan manajemen, termasuk praktik manipulasi laba. Dengan demikian, semakin tinggi persentase komisaris independen, semakin rendah kecenderungan terjadinya manajemen laba.

Menurut Senoaji & Opti (2021), semakin besar proporsi komisaris independen dalam dewan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Pengawasan yang optimal tersebut akan mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat dipercaya, serta mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara lebih baik. Dengan demikian, peningkatan

jumlah komisaris independen cenderung dapat menekan praktik manajemen laba. Berdasarkan *Agency Theory*, dewan komisaris independen berfungsi sebagai organ pengawas internal yang independen dari pengaruh manajemen. Ketika perusahaan mengalami kondisi *financial distress*, dorongan manajemen untuk melakukan manipulasi laba sangat tinggi. Keberadaan dewan komisaris independen yang efektif akan memperketat pengawasan, sehingga memperlemah (menekan) kecenderungan manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba saat berada dalam kondisi tekanan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Dewan komisaris independen mampu memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap manajemen laba.

4. Dewan Komisaris independen berperan sebagai Variabel Moderasi antara Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan karena investor institusional berperan dalam mengawasi kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin efektif pengawasan yang dilakukan, sehingga dapat menekan tindakan manajemen yang merugikan pemegang saham. Dengan demikian, kepemilikan institusional yang signifikan mampu mengurangi motivasi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Struktur kepemilikan yang kuat dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen sehingga berpotensi menekan praktik manajemen laba. Namun, hasil penelitian terkait kepemilikan

institusional masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten (Malajai & Yoosita, 2024).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga besar kecilnya kepemilikan saham institusi tidak menentukan tingkat manipulasi laba. Di sisi lain, terdapat penelitian yang menemukan pengaruh positif, di mana dominasi kepemilikan institusional justru meningkatkan praktik manajemen laba. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif, yaitu semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin rendah praktik manajemen laba karena adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen (Rakasiwi & Pujiati, 2024). Maka hipotesis adalah sebagai berikut :

H4 : Dewan komisaris independen memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba